



DASAR-DASAR ILMU POLITIK

By: Ita Mutiara Dewi



PERTEMUAN KE - 1

DEFINISI POLITIK



Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:

- polites berarti warga negara
- politikos berarti kewarganegaraan
- politike te ekne' berarti kemahiran politik
- politike episteme berarti ilmu politik



Secara terminologis

- Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang lebih mengarah pada “usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan”
(POLITICS)
- Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik.
- Menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, yang lebih mengarah pada kebijakan atau kebijaksanaan **(POLICY)**
- Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik keuangan.

Fokus Ilmu Politik



- Negara (Barent, Soltau, Bluntschli, Yacobsen & Lipman)
- Kekuasaan (de Huszar & Stevenson, Lasswell & Kaplan, Flechtheim, Soemardi,)
- Pengambilan keputusan (Mitchell , Deutsch)
- Kebijakan umum (Easton, Hoogerwerf)
- Distribusi dan alokasi (Lasswell)

RUANG LINGKUP (UNESCO, 1950)



I. TEORI POLITIK

- TEORI POLITIK
- SEJARAH PERKEMBANGAN IDE-IDE POLITIK

II. LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK

- UUD
- Pemerintah Nasional
- Pemerintah Daerah dan Lokal
- Fungsi ekonomi dan sosial pemerintah
- Perbandingan lembaga-lembaga politik



III. PARTAI, KELOMPOK DAN PENDAPAT UMUM

- Partai politik
- Golongan/kelompok/asosiasi
- Partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi
- Pendapat umum

IV. HUBUNGAN INTERNASIONAL

- Politik Internasional
- Organisasi dan administrasi Internasional
- Hukum Internasional



PERTEMUAN KE - 2

SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK

ZAMAN YUNANI KUNO (Konsep Negara yang Ideal)

Plato (427 – 347 SM)

- Politeia
- Nomoi



Aristoteles (384 – 322 SM)

- **Politica**
- **5 tahapan :**
 - Perumusan masalah
 - Pengumpulan kasus
 - Pengklasifikasian kasus
 - Pengkorelasian antara jumlah penguasa dengan kadar stabilitas.
 - Penganalisaan tipe pemerintah yang stabil.



ZAMAN ROMA (Konsep Negara yang Ideal)

- **Kaisar Justinianus (482-565 M)**
 - **Codex**
 - **Digest**
 - **Institutes**
 - **Novels**
- **Kodifikasi ini kemudian menjadi dasar tata hukum dan dasar konstitusi (UUD)**



Abad Pertengahan (Pendirian Kerajaan Tuhan)

- Dante – De Monarchia
- Perebutan kekuasaan antara Gereja dan Raja
- Menguatnya feodalisme



Awal Zaman Modern



Niccolò

Machiavelli

- **Il Principe
(The Prince)**

Jean Bodin

- **Les Six Livres
de la
Republique**

ZAMAN MODERN



**Thomas Hobbes
(1588 – 1676 M)**

- **Filsafat Politik
“Leviathan”**

**John Locke (1632 –
1704 M)**

- **Two Treaties of Civil
Government (Legislatif,
Eksekutif, dan Federatif)**

**– Montesquieu
(1689 – 1755 M)**

- **L'esprit de Lois
(Spirit of Laws)**
- **Trias Politika
(Legislatif,
Eksekutif,
Yudikatif)**



**Jean Jacques
Rousseau (1712 –
1778 M)
Du Contract Social
(Principes du Droit
Politique) 1762
L'esprit de Lois
(Spirit of Law)**

- **Abad ke 19 dan 20**
- **Charles E. Merriam
(University of Chicago)**





Pertemuan Ke - 3

TEORI POLITIK



Bahasan dan generalisasi daripada fenomena-fenomena yang bersifat politik.

Konsep dan Teori Politik (Yenkin)

- *Political entities* (kesatuan politik) yang mewujudkan pelaku-pelaku dalam hubungan politik seperti negara;
- Konsep tentang hubungan antara pelaku-pelaku seperti wewenang, perintah;
- Konsep mengenai pranata-pranata politik seperti badan legislatif, eksekutif, yudikatif.

Jenis Teori Politik

Yenkin

- Valutional

political philosophy

systematical political theory

political ideology

- Non Valutional

Getteli

- Konservatif
- Radikal



Sumber Teori Politik

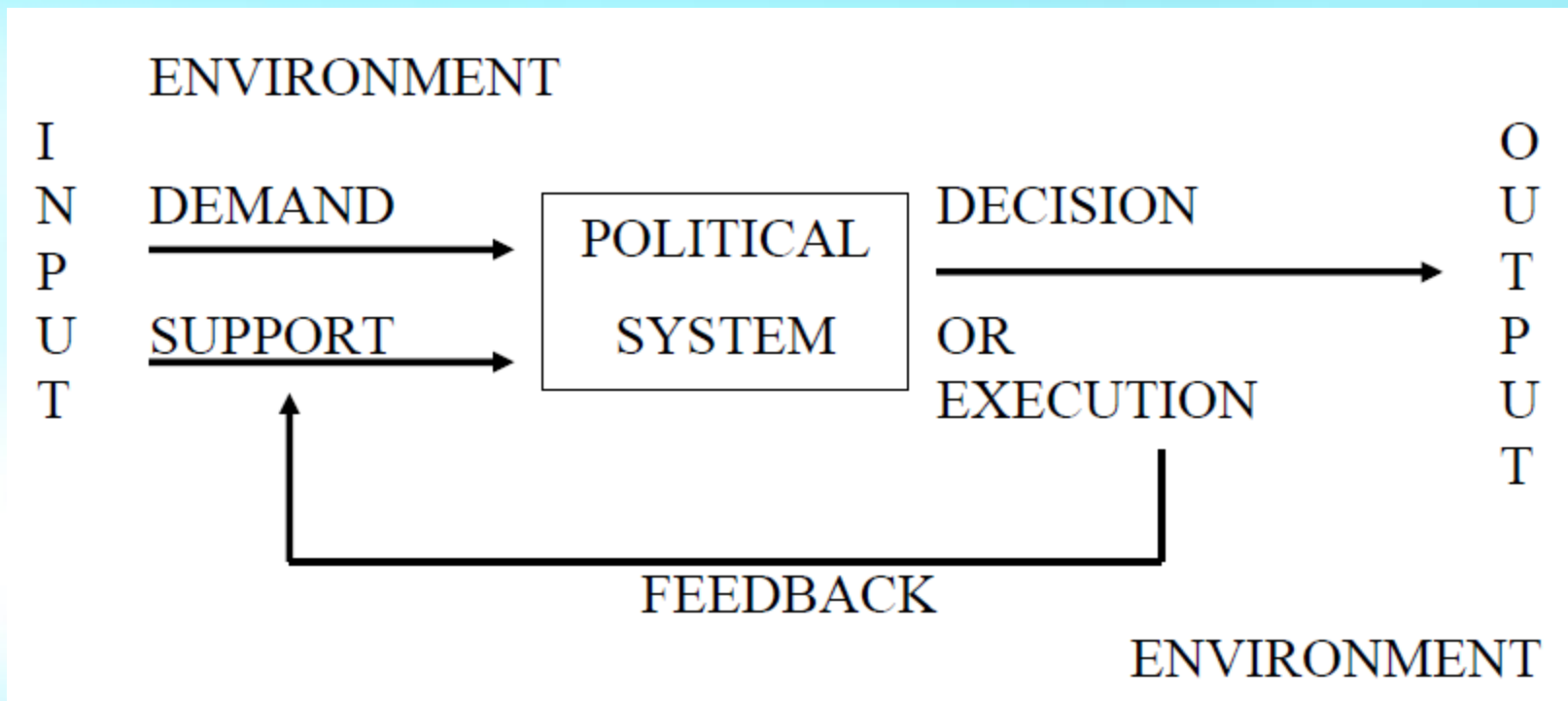


- Pernyataan-pernyataan / tulisan-tulisan dari orang-orang yang memegang kekuasaan negara dan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dalam masyarakat
- Dokumen-dokumen resmi dari negara seperti:
 - Undang-undang Dasar
 - Undang-undang
 - Peraturan-peraturan
 - Perjanjian dengan negara lain
 - Keputusan pengadilan, dsb
 - Surat-surat kabar, majalah-majalah sebagai alat penerangan masyarakat dan propaganda

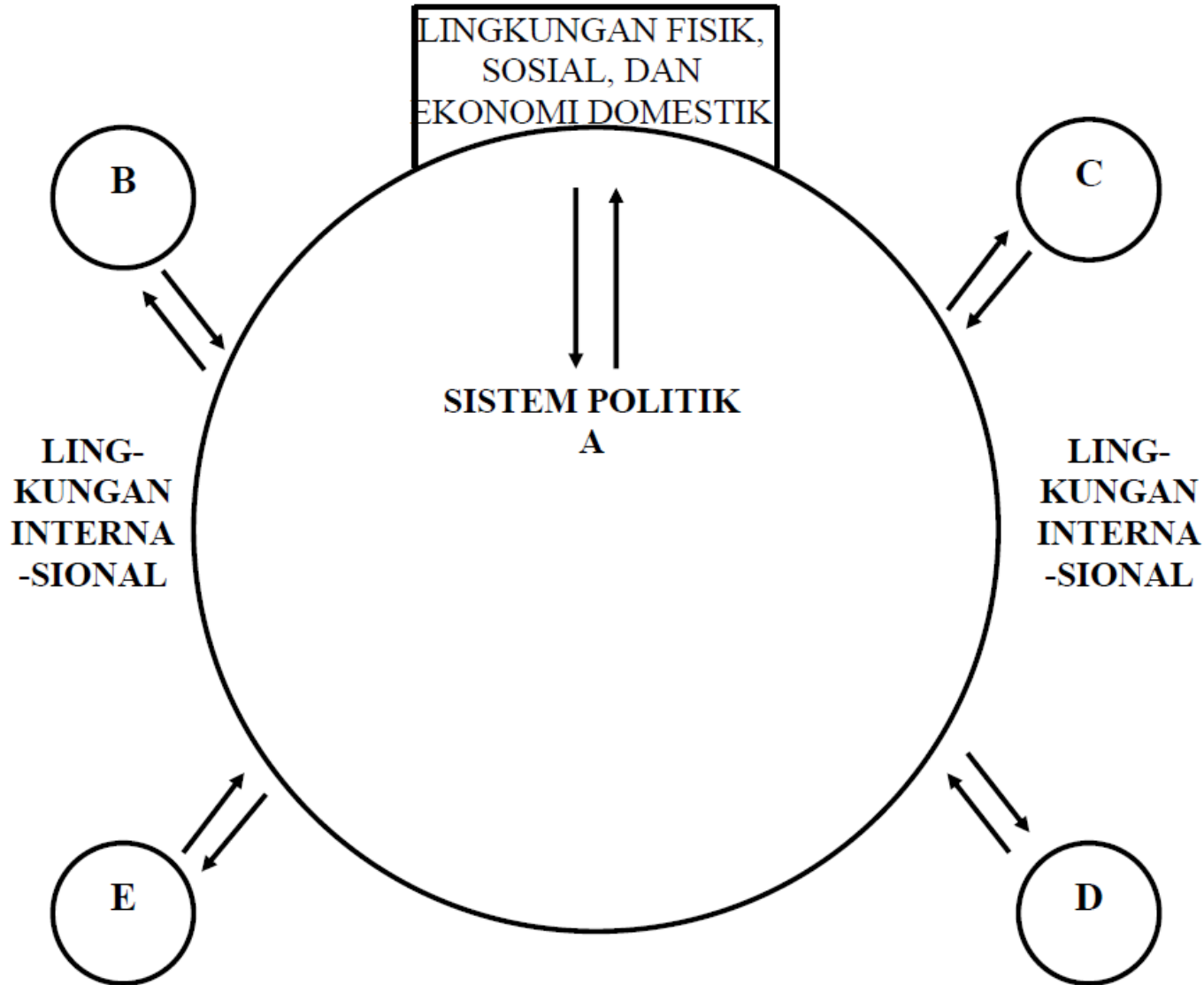


Pertemuan Ke – 4 & 5

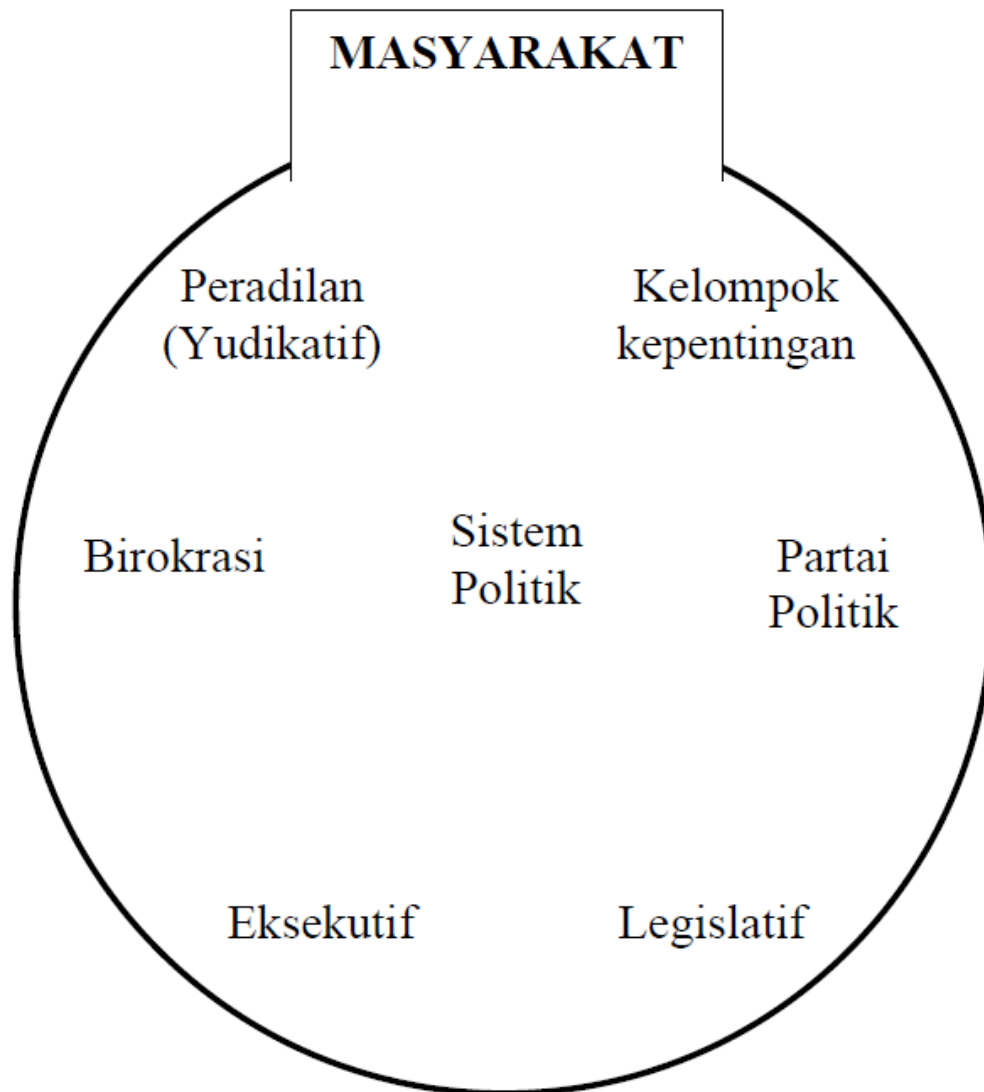
SISTEM POLITIK



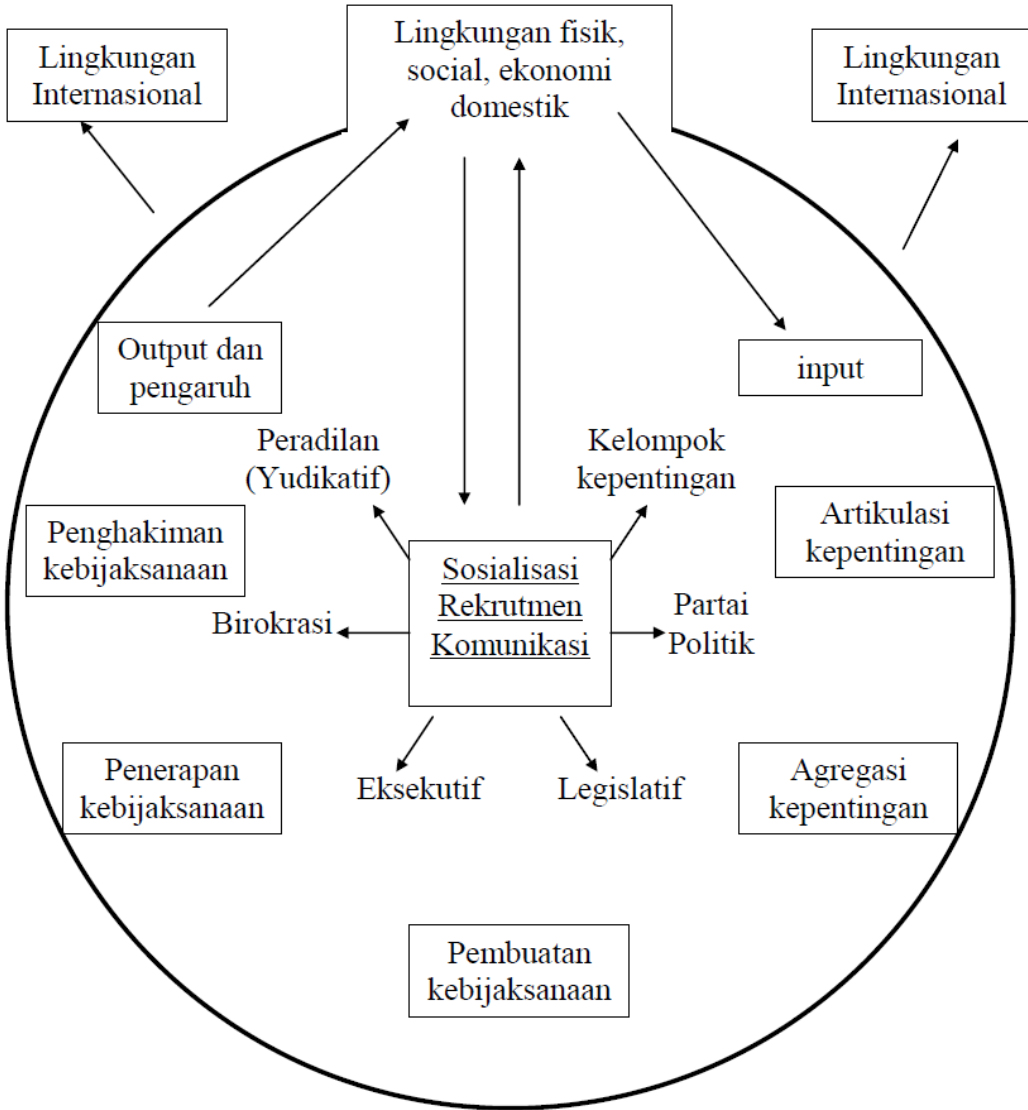
SISTEM POLITIK DAN LINGKUNGAN



SISTEM POLITIK DAN STRUKTUR



SISTEM POLITIK: STRUKTUR DAN FUNGSI





Pertemuan Ke - 6

NEGARA



Budiarjo:

suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Sifat negara:

Memaksa

Monopoli

Mencakup semua

Unsur negara

- Wilayah
- Penduduk
- Pemerintah
- Kedaulatan



Teori Asal Negara

- Divine
- Natural/instinctive (Aristoteles)
- Force (Gumplowitz & Oppenheimer)
- Social Contract (Locke, Hobbes, Rosseau)



Bentuk



Kedaulatan

- Kesatuan
- Federal
- Perserikatan (Union)
- Dominion/Commonwealth
- Koloni
- Protektorat
- Mandat
- Trust

Wilayah

- City State
- Nation State
- Region State
- Global State



Pertemuan Ke - 7

PEMERINTAHAN



- Aristoteles

Baik	Buruk
Monarki Aristokrasi Polity/Politia	Tirani Oligarki Demokrasi ⁶

- Rodee

Pemerintahan di tangan	Nama	Nilai
Satu orang	Monarki	Baik
Satu orang	Tirani	Buruk
Sedikit orang	Aristrokasi	Baik
Sedikit orang	Oligarki	Buruk
Banyak orang (rakyat)	Demokrasi	Baik
Banyak orang (rakyat)	Mobokrasi	Buruk

1. Dasar Konstitusional
 - a. Oligarki
 - Monarki
 - Diktator
 - Teokrasi
 - Kepemimpinan jamak
 - b. Demokrasi
 - Monarki terbatas
 - Republik
2. Dasar ekonomi⁷
 - a. Pemerintahan primitif
 - b. Pemerintahan feodal
 - c. Pemerintahan kapitalis
 - d. Pemerintahan sosialis
3. Dasar Jenis masyarakat
 - a. Pemerintahan suku
 - b. Pemerintahan polis
 - c. Pemerintahan negeri/country
 - d. Pemerintahan nasional
 - e. Pemerintahan multi nasional
 - f. Pemerintahan dunia
4. Dasar struktur kedaulatan⁸
 - a. Pemerintahan kesatuan
 - b. Imperium
 - c. Pemerintahan Federal



1. Demokrasi
2. Oligarki
3. Monarki

1. Republik
2. Kerajaan
3. Despotisme



Pertemuan Ke – 8 & 9

LEMBAGA POLITIK



- **Legislatif**

Pembuat UU

Wakil Rakyat: Perwakilan Politik & Perwakilan
Kepentingan

Uni Kameral & Bi Kameral

Fungsi

Rule Making

Executive Control

Eksekutif



- Pelaksana kebijakan dan penyelenggara UU
- Presidensial: Presiden + Menteri
- Parlementer : PM + Menteri
- Monarki Parlementer, Raja = eksekutif (The King can do no wrong)

Ciri Presidensial



- Legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang independen dan dipilih oleh rakyat secara terpisah.
- Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) di tangan presiden.
- Kebijakan yang komprehensif jarang dapat dibuat, karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan terpisah.
- Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan ada di satu tangan.

Ciri Parlementer



- Anggota parlemen dipilih langsung oleh warga negara melalui pemilu.
- PM dan menteri dipilih oleh parlemen, anggota parlemen, biasanya adalah anggota kabinet.
- Kabinet dapat bertahan jika mendapat persetujuan parlemen.
- PM dapat membubarkan parlemen dan membentuk parlemen baru melalui pemilu.

Wewenang Eksekutif



- Diplomatik
- Administratif
 - Melaksanakan UU dan peraturan-peraturan lain.
 - Menyelenggarakan administrasi negara.
- Militer
 - Mengatur Angkatan Bersenjata
 - Menyelenggarakan perang
 - Menjamin keamanan dan pertahanan.
- Yudikatif – memberi grasi, amnesti, dsb.
- Legislatif
 - Merencanakan RUU
 - Mengusulkan ke badan perwakilan rakyat sampai menjadi UU.

YUDIKATIF

- Rule Adjudication
- Penyelesaian Konflik



Fungsi penghakiman peraturan :

- Konservatif
 Jaminan atas kepastian hukum dengan menerapkan peraturan yang ada.
- Progresif
 Menciptakan aturan baru dengan melakukan interpretasi atas UUD atau UU yang ada



PERTEMUAN KE-10 & 11

KEKUASAAN : Kemampuan Mempengaruhi



- Merupakan hubungan antara manusia.
- Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain
- Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi atau pemerintah.
- Sarana kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau pemerintan (negara).
- Pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan.
- Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, konsensus atau kombinasi.
- Tujuan yang hendak dicapai (baik/buruk)
- Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu menguntungkan siapa? (tergantung distribusi kekuasaan).
- Umumnya sumber-sumber digunakan dan dilaksanakan masyarakat umum.
- Kekuasaan merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik.

Dimensi Kekuasaan



- a. Potensial – Aktual
 - Sumber-sumber kekuasaan
- b. Konsensus - paksaan
 - alasan mentaati kekuasaan
- c. Positif - Negatif
 - penggunaan sumber-sumber kekuasaan (sistem nilai).
- d. Jabatan – Pribadi
- e. Implisit – Eksplisit
 - pengaruh dirasakan dan terlihat atau tidak.
- f. Langsung – Tidak langsung
 - dalam menggunakan sumber-sumber, ada perantara atau tidak.

Kewenangan : legitimate power



Sumber kewenangan

1. Tradisi
2. Tuhan
3. Peraturan Perundangan
4. Kualitas Pribadi
5. Sumber Instrumental

Peralihan Kewenangan:

1. Pemilihan
2. Turun temurun
3. Paksaan

LEGITIMASI: pengakuan keabsyahan kewenangan

- Sumber legitimasi
 1. Simbolis
 2. Prosedural
 3. Materiil

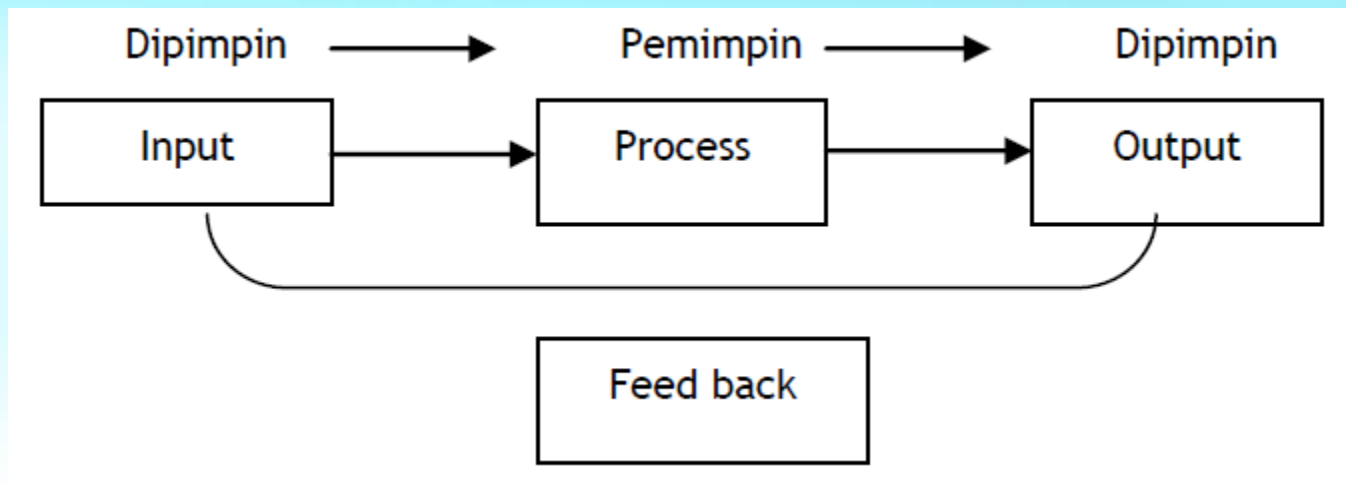


Tipe-tipe legitimasi

- Tradisional
- Ideologi
- Kualitas Pribadi
- Prosedural
- Instrumental



Keterkaitan Kekuasaan Kewenangan Legitimasi





Pertemuan Ke – 12 & 13

PARTAI POLITIK

- Organisasi
- Ideologi
- Kepentingan
 - umum/masyarakat
 - kelompok/golongan
 - individu
- Kekuasaan
 - urusi masyarakat
 - urusi kelompok
 - urusi pribadi



Sejarah Parpol



- Intra parlemen = April 1789- versailles “ Breton Club/Jacobins “ (lokal dan ideologis).
- Ekstra parlemen
 - Partai buruh Inggris “ Kongres Serikat Buruh 1899 ”

Tugas Parpol

- Sosialisasi politik
- Rekrutmen politik
- Komunikasi politik
- Artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan
- Partisipasi politik
- Pembuat kebijakan



3 Sistem Kepartaian (Douverger)

- One party system
- Two party system
- Multi party system

Jenis:

Lokal

Nasional

Internasional



Pendekatan Parpol



- Pemilu (Intro – Parlemen)
- jangka pendek = % suara untuk capai kekuasaan
- Penyiapan kader, pembinaan masyarakat, pembentukan opini ke tengah masyarakat tentang berbagai masalah sosial, politik, dan budaya menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
- (Intra – Parlemen dan Ekstra – Parlemen)